

KAJI TINDAK PENINGKATAN PERAN KOPERASI DAN UKM SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN ALTERNATIF

Jannes Situmorang*

Abstrak

This assessment has the objectives of a). To asses the effectiveness and efficiency of alternative financing institution and its role in the system of financing SMEs and Cooperative; b). To formulate strategy and action program to increasing the role of alternative financing institution in the financing system of SMEs and Cooperatives. Assessment was done in nine (9) provinces with study objects BMT in the form KSM and Sa'riah Cooperative. Sample was determined through purposive and data analysis by using descriptive analysis. Result of the study showed that BMT is very effective and efficient in serving the demand of financing short term working capital for micro & small enterprises. In doing the business, BMT used the serving principle of simple, cheap and quick. In the midst of the economic crisis and large scale banks collapse, but the assets of BMT grew in the range of 200% to 500% per annum. BMT business earned a significant profit and advantage for the owner. Credit application procedure was not complicated, within relatively short time, no collateral requirement, and the collateral is thrust of the informal leaders or local government who deeply knew about the character, personality and the background of the debtor. The unique of BMT of the other financing institution is that the interest/finance given to the clients/members are always discussed and agreed and flexible. If the debtor could not payback the loan at all with the reason of bankruptcy for example so the loan would be erased. In order the financial position of BMT not disturb by Baitul Maal.

Kata kunci : LKA Memberdayakan Masyarakat Grass Root

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan perannya sebagai bagian integral dalam perekonomian nasional. Tujuan lainnya untuk menumbuhkannya menjadi usaha yang efisien, sehat dan mandiri dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dalam kenyataannya, koperasi dan UKM belum mampu menunjukkan perannya secara optimal seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya hambatan dan kendala yang bersifat internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan UKM. Salah satu hambatan dan kendala dimaksud adalah lemahnya sistem pendanaan untuk membiayai aktivitas usahanya. Koperasi dan UKM mengalami kesulitan untuk mengakses sumber-sumber permodalan atas lembaga keuangan terutama dari sektor perbankan. Koperasi dan UKM belum mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit yang biasanya diukur dengan 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*). Capital dan collateral adalah dua faktor yang paling sulit dipenuhi. Selain masalah 5C di atas, koperasi dan UKM mengalami berbagai masalah dalam

*) Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK

memperoleh kredit bank, seperti bunga tinggi, jangkauan pelayanan bank yang masih terbatas.

Pada dasarnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. *Pertama*, BMT yang didirikan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang belum berbadan hukum koperasi tetapi menggunakan aturan main persis seperti koperasi. *Kedua*, BMT yang sudah berbadan hukum koperasi. Dengan adanya berbagai masalah tersebut, maka perlu dilakukan kaji tindak atas peran BMT sebagai lembaga keuangan alternatif.

2. Rumusan Masalah

Karena belum adanya penilaian terhadap kinerja lembaga keuangan alternatif dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi rakyat, maka timbul pertanyaan berikut:

- 1). Apakah usaha lembaga keuangan alternatif sudah efektif dan efisien dan bagaimana peranannya dalam sistem pembiayaan koperasi dan UKM?
- 2). Bagaimana rumusan strategi dan program aksi peningkatan peran lembaga keuangan alternatif dalam sistem pembiayaan koperasi dan UKM?

3. Tujuan dan Manfaat

Kajian ini bertujuan untuk:

- 1). Mengkaji efektivitas dan efisiensi usaha lembaga keuangan alternatif dan peranannya dalam sistem pembiayaan koperasi dan UKM.
- 2). Merumuskan strategi dan program aksi peningkatan peran lembaga keuangan alternatif dalam sistem pembiayaan koperasi dan UKM.

Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi bagi penyempurnaan kebijaksanaan yang dapat mendorong peningkatan peran koperasi jasa keuangan sebagai lembaga keuangan alternatif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian

Beberapa ahli mendefinisikan lembaga keuangan alternatif sebagai lembaga pendanaan di luar sistem perbankan konvensional dengan sistem bunga. Lembaga keuangan alternatif meliputi Perusahaan Modal Ventura, Leasing, Factoring (anjak piutang), Guarantee Fund, Perbankan Syariah, Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Suhadi Lestiadi (1998), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga keuangan alternatif adalah suatu lembaga pendanaan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, dimana proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana, murah dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan berazaskan keadilan. Dengan cara pandang dan pengertian lembaga pendanaan tersebut, maka istilah koperasi jasa keuangan diartikan sebagai koperasi yang menyelenggarakan jasa keuangan alternatif misalnya koperasi syariah dan Unit Simpan Pinjam Syariah, Kelompok Swadaya Masyarakat Pra Koperasi termasuk BMT, Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI).

Menjadi pertanyaan, siapa yang pantas disebut lembaga keuangan alternatif? Ada yang berpendapat bahwa lembaga keuangan alternatif yang menggunakan sistem bagi hasil dianggap sebagai sistem non konvensional dibanding sistem bunga. Sebagian lainnya berpendapat bahwa yang menjadi persoalan bukan sistem bagi

hasil atau sistem bunganya itu, tetapi lebih mengacu pada kedekatan dan orientasi pelayanannya yang harus memihak pada rakyat kecil.

Prinsip dari kegiatan lembaga ini adalah memobilisasi dana dari kelompok masyarakat yang mengalami **surplus dana** dan kemudian mengalokasikannya kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dana atau masyarakat yang **deficit dana**. Ada dua cara dalam menjalankan usahanya. *Pertama*, menganut sistem bunga, artinya kepada setiap penyimpan diberikan bunga sebagai imbalan atas tabungannya dan kepada setiap peminjam juga dikenakan bunga sebagai balas jasa kepada pemilik dana. *Kedua*, menganut sistem syariah (bagi hasil) yang sering disebut sistem Islam. Dalam Sistem Syariah, insentif bagi setiap penyimpan diberikan dalam bentuk bagi hasil yang dihitung dari nisbah bagi hasil tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Bagi Si Peminjam, juga dikenakan sistem bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah Balai Mandiri Terpadu (BMT) merupakan salah satu lembaga pendanaan alternatif yang beroperasi di tengah masyarakat akar rumput. Pinbuk (1995) menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah dan koperasi. BMT memiliki dua fungsi yaitu : *Pertama*, *Baitul Maal* menjalankan fungsi untuk memberi santunan kepada kaum miskin dengan menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) kepada yang berhak; *Kedua*, *Baitul Taamwil* menjalankan fungsi menghimpun simpanan dan membiayai kegiatan ekonomi rakyat dengan menggunakan Sistem Syariah.

Sistem bagi hasil adalah pola pembiayaan keuntungan maupun kerugian antara BMT dengan anggota penyimpan berdasarkan perhitungan yang disepakati bersama. BMT biasanya berada di lingkungan masjid, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, pasar maupun di lingkungan pendidikan. Biasanya yang mensponsori pendirian BMT adalah para aghniya (dermawan), pemuka agama, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, cendekiawan, tokoh masyarakat, dosen dan pendidik. Peran serta kelompok masyarakat tersebut adalah berupa sumbangan pemikiran, penyediaan modal awal, bantuan penggunaan tanah dan gedung ataupun kantor. Untuk menunjang permodalan, BMT membuka kesempatan untuk mendapatkan sumber permodalan yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh dari orang-orang tersebut. Hasil studi Pinbuk (1998) menunjukkan bahwa lembaga pendanaan yang saat ini berkembang memiliki kekuatan antara lain: a). mandiri dan mengakar di masyarakat, b). bentuk organisasinya sederhana, c). sistem dan prosedur pembiayaan mudah, d). memiliki jangkauan pelayanan kepada pengusaha mikro. Kelemahannya adalah : a). skala usaha kecil, b). permodalan terbatas, c). sumber daya manusia lemah, d). sistem dan prosedur belum baku. Untuk mengembangkan lembaga tersebut dari kelemahannya perlu ditempuh cara-cara pembinaan sbb: a). pemberian bantuan manajemen, peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pelatihan, standarisasi sistem dan prosedur, c). kerjasama dalam penyaluran dana, d). bantuan dalam inkubasi bisnis.

3. Pola Tabungan dan Pembiayaan

1). Tabungan

Tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan usaha kepada pihak BMT. Jenis-jenis tabungan/simpanan adalah sebagai berikut: (1). Tabungan persiapan qurban; (2). Tabungan pendidikan; (3). Tabungan persiapan untuk nikah; (4). Tabungan persiapan untuk melahirkan; (5). Tabungan naik haji/umroh; (6). Simpanan berjangka/deposito; (7). Simpanan khusus untuk kelahiran; (8). Simpanan sukarela; (9). Simpanan hari tua; (10). Simpanan aqiqoh.

2). Pola Pembiayaan

Pola pembiayaan terdiri dari *bagi hasil* dan jual beli dengan *mark up*

(1). Bagi Hasil

Bagi hasil dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bagi hasil ini dibedakan atas:

- *Musyarakah*, adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.
- *Mudharabah*, adalah perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al amal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama terlebih dahulu di depan. Manakala rugi, shahib al amal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan manajerial skill selama proyek berlangsung.
- *Murabahah*, adalah pola jual beli dengan membayar tangguh, sekali bayar.
- *Muzaraah*, adalah dengan memberikan l kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.
- *Wusaqot*, adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah dimana si penggarapnya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas rasio tertentu dari hasil panen.

(2). Jual Beli dengan Mark Up (keuntungan)

Jual beli dengan mark up merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli tambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin/mark up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi kepada penyedia dan penyimpan dana. Jenis-jenisnya adalah:

- *Bai Bitsaman Ajil (BBA)*, adalah proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara lebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.
- *Bai As Salam*, proses jual beli dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.

- *Al Istishna*, adalah kontrak order yang ditandatangani bersamaan antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan jenis barang tertentu.
- *Ijarah atau Sewa*, adalah dengan memberi penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari sarana barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.
- *Bai Ut Takjiri*, adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.
- *Musyarakah Mustanaqisah*, adalah kombinasi antara musyawarah dengan ijarah (perkongsian dengan sewa). Dalam kontrak ini kedua belah pihak yang berkongsi menyertakan modalnya masing-masing.

3). **Pembiayaan Non Profit**

Sistem ini disebut juga pembiayaan kebajikan. Sistem ini lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Sumber dan pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya, tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan lainnya.

4. **Pembentukan BMT**

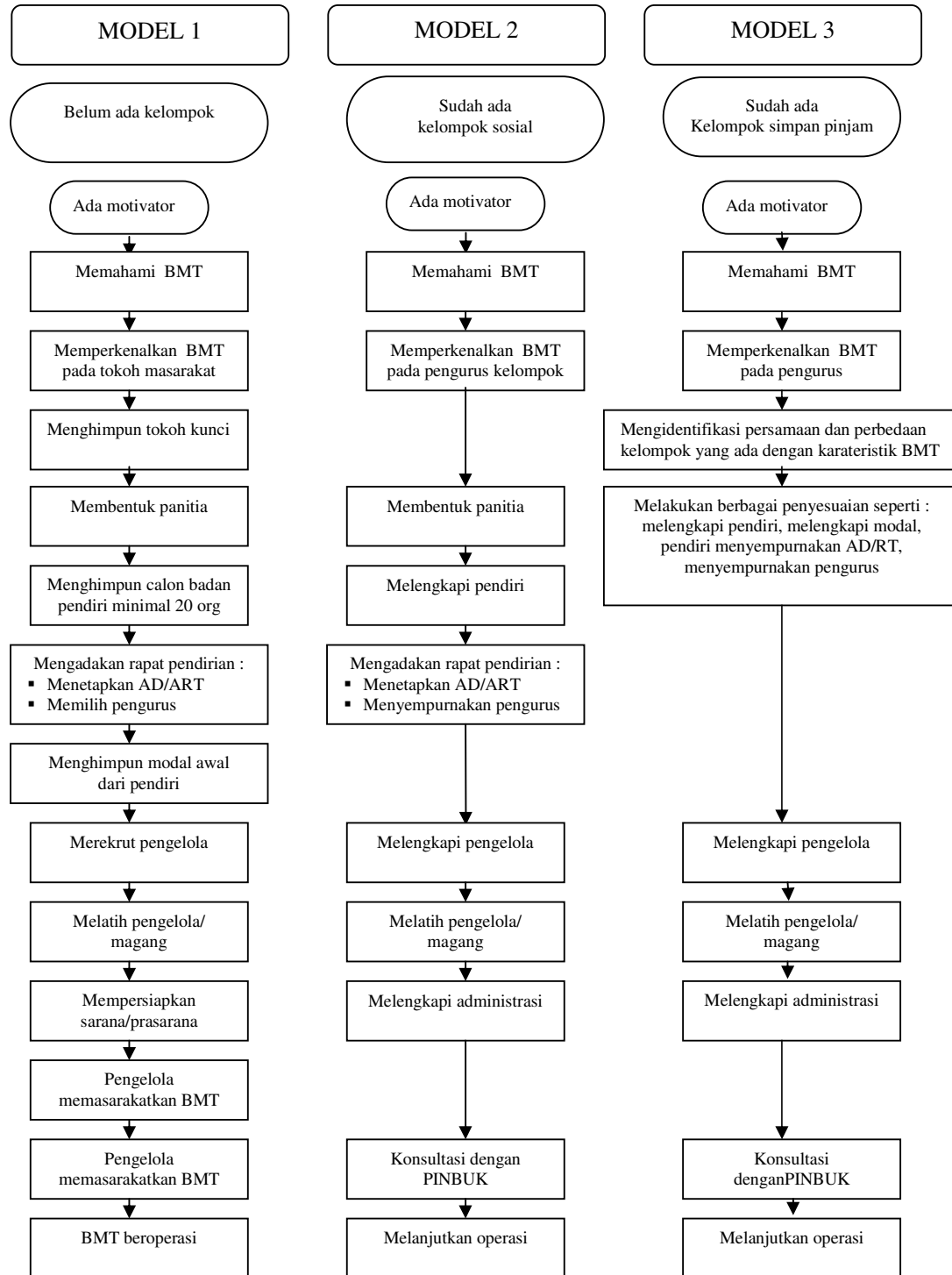
Tujuan pembentukan BMT adalah untuk memperbanyak jumlah BMT sedangkan tujuan BMT itu sendiri adalah untuk : 1) memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum, 2) meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil dengan pelaku lain. Proses pembentukan BMT adalah sebagai berikut:

Pertama, para pendiri minimum 20 orang. Para pendiri menghubungi PINBUK setempat untuk mengurus perijinan pendiriannya. *Kedua*, mendaftarkan calon pengelola untuk mengikuti pelatihan singkat dan magang. *Ketiga*, mempersiapkan modal awal sebesar Rp. 5juta di pedesaan dan Rp.10juta di perkotaan. *Keempat*, jika bermaksud menjadi koperasi, BMT dapat segera mengajukan permohonan badan hukum koperasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan BMT adalah:

- 1). Motivator (penggerak), memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap sukses awal pendirian BMT. Penggerak ini berasal dari masyarakat setempat yang atas inisiatif sendiri atau inisiatif PINBUK dan pihak lain berminat membentuk BMT.
- 2). Pendekatan kepada tokoh kunci yang dapat terdiri dari pimpinan formal, pimpinan informal, usahawan, hartawan, dan dermawan. Para tokoh ini diharapkan bersedia menjadi Panitia Pembentukan BMT.
- 3). Pendekatan kepada para calon pendiri. Pendiri minimal 20 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh yang mewakili berbagai kalangan masyarakat seperti pimpinan formal, agama, adat, pengusaha dan masyarakat banyak. Badan pendiri mengadakan rapat dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BMT serta memilih pengurus yang terdiri dari 3 – 5 orang.
- 4). Pengurus mengadakan seleksi pengelola yang jumlahnya minimal 3 orang yang terdiri manajer, bagian pembiayaan, bagian administrasi/keuangan dan bagian-bagian lain yang dibutuhkan
- 5). Para pengelola yang ditunjuk segera memasyarakatkan BMT dan mencari anggota dan BMT mulai beroperasi.
- 6). Antara pengurus dan pengelola tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.

- 7). Organisasi yang dapat membentuk BMT antara lain seluruh anggota masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, organisasi sosial, organisasi profesi, LSM, proyek-proyek pemberdayaan masyarakat
- 8). Kelompok yang dapat dikembangkan menjadi BMT antara lain: arisan, simpan pinjam, pengajian, tani, usaha ekonomi produktif dan lain-lain.



Sumber : Kajian Balitbangkop, PMK dan Pinbuk (1998)

Gambar 1. Bagan Pembentukan BMT

5. Pembiakan BMT

BMT yang sudah mapan dan mempunyai pengelola yang terampil diharapkan dapat membentuk BMT baru di luar wilayah kerjanya. Langkah-langkah membentuk BMT adalah : 1) BMT yang sudah mapan sebagai BMT induk menempatkan seorang atau lebih pengelola yang terampil sebagai manajer BMT di wilayah kerja baru, 2) BMT induk memfasilitasi pembentukan BMT baru dan menyediakan sarana dan prasarana, 3) Pengelola BMT baru dibawah bimbingan BMT induk menyosialisasikan BMT pada masyarakat sekitar dan mulai beroperasi, 4) Pengelola BMT baru memperkuat BMT-nya dengan merekrut pendiri, membentuk pengurus dan menghimpun modal awal dari masyarakat sekitar. BMT induk bisa melepas BMT baru apabila BMT baru sudah kuat dan mandiri.

III. METODE KAJIAN

1. Lokasi dan Objek Kajian

Kajian dilaksanakan di 9 (sembilan) propinsi yang meliputi : Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan Sulawesi Selatan. Objek telitian adalah BMT dan yang akan diteliti adalah aspek kelembagaan dan keuangan usaha BMT itu sendiri.

2. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan yang berpedoman pada kuesioner yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah.

3. Penarikan Sampel

BMT, baik yang berbentuk KSM maupun koperasi di masing-masing propinsi dijadikan sebagai sampel, dengan total sampel 74 buah. Penarikan sampel (sampling) dilakukan dengan purposive atas BMT yang berada di lingkungan lembaga-lembaga keagamaan.

4. Model Analisis.

Data yang sudah terkumpul dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan *analisa deskriptif*.

5. Organisasi Pelaksana dan Pembiayaan

Kajian ini ditangani satu tim yang terdiri dari Koordinator, Peneliti, Asisten Peneliti dan Staf Administrasi yang dibiayi dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara.

IV. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 74 BMT, dimana 71% diantaranya dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan 29% dalam bentuk koperasi. Pada saat penelitian dilakukan, sebagian KSM sedang dalam proses mendapatkan Badan Hukum Koperasi. Pengamatan di lapang menunjukkan bahwa mekanisme kerja antara kedua bentuk badan hukum tersebut sama. Dengan demikian yang mempengaruhi output kedua lembaga tersebut bukan terletak pada bentuk badan hukumnya tetapi ditentukan semata-mata oleh kemampuan Para Pengelola BMT.

Dalam penelitian ini, yang akan dianalisis secara mendalam adalah kinerja Lembaga Keuangan Alternatif dan Kesehatan Kelembagaan dan Keuangannya.

1. Kinerja Lembaga Keuangan Alternatif

Faktor-faktor yang dianalisis meliputi : 1). Pelayanan mudah, murah dan cepat, 2). Pertumbuhan asset BMT, 3). Kemampuan menyediakan pembiayaan, 4). Kebutuhan tambahan modal, 5). Mobilisasi tabungan, 6). kemampuan menghasilkan laba, 7). Sarana Usaha.

1). Pelayanan Mudah, Murah dan Cepat

Hasil penelitian lapang menunjukkan bahwa BMT menempuh cara-cara yang mudah dan murah dalam memberikan pelayanan kepada para nasabah/anggota. Sebagai contoh, untuk mendapatkan pembiayaan, katakanlah dibawah Rp. 300.000,- nasabah cukup mengisi formulir permohonan pinjaman dan diikuti dengan peninjauan lokasi dan pengamatan usaha yang bersangkutan. Untuk pembiayaan yang sangat kecil ini biasanya BMT tidak mensyaratkan agunan tambahan, kecuali pembiayaan di atas Rp.500.000,-. Untuk menjamin pembiayaan kembali tepat waktu dan jumlah, BMT cukup menilai kelayakan usaha dengan cara mendatangi lokasi usaha. Penilaian kelayakan usaha dimaksudkan untuk memperkirakan kemampuan mengembalikan dalam jumlah dan waktu yang tepat. Umumnya permohonan pinjaman dapat disetujui atau ditolak dalam tempo kurang dari 1 minggu. Bagi nasabah lama jangka waktu pengembalian keputusan untuk menolak atau menerima pengajuan pembiayaan bisa lebih pendek lagi yaitu antara 1 – 3 hari. Selain itu, biaya pengurusannya sangat murah yaitu dalam bentuk pungutan biaya administrasi dan meterai. Data lapang menunjukkan bahwa BMT memungut biaya dari 68% nasabah sebesar 0,5% - 1%, sebanyak 2% dari 21% nasabah dan Rp.2.000,- dari 11% nasabah peminjam.

2). Pertumbuhan Asset BMT

Dilihat dari sisi debit neraca BMT, assetnya terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Sementara dilihat dari sisi kredit pada neraca, asset BMT merupakan penjumlahan simpanan suka rela dan jumlah modal yang dimiliki. Nilai asset dapat mencerminkan kekayaan dan kewajiban BMT kepada para pemilik maupun pihak ketiga. BMT yang assetnya mengalami pertumbuhan terus menerus berarti BMT itu selain tumbuh makin besar, juga berarti semakin dipercayai baik oleh pihak pemilik maupun pihak ketiga. Tabel 1 menunjukkan bahwa BMT yang memiliki asset senilai kurang dari Rp.10 juta sebanyak 15%, kemudian yang memiliki Rp.10 juta s/d Rp.30juta sebanyak 51%, yang memiliki asset Rp.30 juta s/d Rp.60juta sebanyak 17%, yang memiliki asset Rp.60juta s/d Rp.100juta sebanyak 10% dan yang memiliki asset lebih dari Rp.100juta sebanyak 5%. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar BMT memiliki asset di bawah Rp.30 juta.

Menganalisis asset BMT dari nilai besarnya tidaklah cukup, karena itu perlu memperhatikan tingkat pertumbuhannya. Angka-angka pertumbuhan dapat mencerminkan tingkat perkembangan BMT yang sesungguhnya. Hampir semua BMT yang diteliti menunjukkan pertumbuhan asset yang sangat cepat.

Tabel 1. BMT Sampel Menurut Nilai Assetnya

No	Nilai Asset BMT	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	<Rp. 10 jt	9	15
2	>Rp.10 jt - Rp 30 jt	31	51
3	>Rp.30 jt - Rp 60 jt	10	17
4	>Rp.60 jt - Rp 100 jt	6	10
5	>Rp.100 jt	3	5
Total		59	100

Tabel 2 memperlihatkan sejauh mana pertumbuhan asset BMT pertahun dapat dicapai. Sebanyak 24% BMT sampel mengalami pertumbuhan asset sebesar kurang dari 0,5 kali pertahun. BMT yang mengalami pertumbuhan asset sebesar antara 0,5 kali s/d 1 kali pertahun sebanyak 17%. BMT yang mengalami pertumbuhan asset sebesar lebih dari 1 kali s/d 2 kali pertahun sebanyak 13%. Kemudian sebanyak 6% BMT sampel mengalami pertumbuhan asset sebesar lebih dari 2 kali s/d 3 kali. BMT yang mengalami pertumbuhan asset lebih dari 3 kali s/d 4 kali pertahun sebanyak 9% dan 31% BMT sampel mengalami pertumbuhan asset sebesar 5 kali pertahun.

Tabel 2. BMT Sampel Menurut Tingkat Pertumbuhan Asset /Tahun

No	Pertumbuhan Asset BMT Dalam Satu Tahun (kali)	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	< 0,5	13	24
2	> 0,5 – 1	9	17
3	> 1 – 2	7	13
4	> 2 – 3	3	6
5	> 3 – 4	5	9
6	> 5	17	31
Jumlah		54	100

3). Kemampuan Menyediakan Pembiayaan

Dari BMT sampel yang diamati terlihat adanya peningkatan kemampuan atas penyediaan pembiayaan usaha kecil. Nasabah usaha kecil yang dilayani BMT adalah pedagang pasar, bakul sayur, tukang bakso, pedagang eceran, warung, pedagang keliling dan usaha mikro lainnya. Mereka membutuhkan modal kerja dengan perputaran harian, mingguan atau bulanan. Hasil penelitian atas BMT menunjukkan (lihat Tabel 3) bahwa BMT melayani pinjaman mingguan sebanyak 26% dan pinjaman bulanan sebanyak 74%.

Tabel 3. BMT Sampel Menurut Jangka Waktu Pembiayaan

No	Jangka Waktu Pembayaran	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	Mingguan	18	26
2	Bulanan	50	74
Total sampel		68	100

Kemampuan menyediakan pinjaman sangat bervariasi dan besarnya dipengaruhi usia BMT, kesanggupan pendiri menyediakan tambahan modal, jangka waktu pengembalian serta ketaatan pengembalian pinjaman dari para nasabah. Hasil pengamatan (lihat Tabel 4) menunjukkan bahwa BMT yang mampu menyediakan total pembiayaan sebesar antara Rp. 5juta lebih s/d Rp.10juta sebanyak 15%; sebesar Rp. 10juta lebih s/d/Rp. 25juta sebanyak 24%; sebesar Rp. 25juta lebih s/d Rp. 50juta sebanyak 11% dan sebesar Rp. 50juta lebih sebanyak 25%.

Tabel 4. BMT Sampel Menurut Kemampuan Menyediakan Pembiayaan

No	Total Nilai Pembiayaan	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	< 5 jt	14	20
2	> 5 s/d 10 jt	11	15
3	> 10 s/d 25 jt	21	29
4	> 25 s/d 50 jt	8	11
5	> 50 jt	18	25
Total sampel		72	100

Kemudian Tabel 5 menunjukkan bahwa sebanyak 22% BMT mampu melayani kurang dari 30 orang nasabah; sebanyak 25% BMT sampel mampu melayani lebih dari 30 s/d 100 orang; sebanyak 26% BMT sampel mampu melayani nasabah lebih dari 100 s/d 200 orang nasabah; sebanyak 27% BMT sampel melayani lebih dari 200 orang nasabah.

Tabel 5. BMT Sampel Menurut Jumlah Nasabah Yang Dilayani

No	Jumlah Nasabah Dilayani (Orang)	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	< 30	15	22
2	> 30 – 100	17	25
3	> 100 – 200	18	26
4	> 200	19	27
Jumlah		69	100

BMT dalam memberikan pinjaman kepada para nasabah menentukan batas pinjaman minimum dan maksimum. Tabel 6 menunjukkan bahwa sebanyak 27% BMT sampel menerapkan nilai minimum pinjaman sebesar Rp. 50.000,- ke bawah; sebanyak 28% BMT sampel menerapkan nilai minimum Rp. 50.000,- s/d Rp. 150.000,- dan 45% BMT menerapkan nilai minimum pinjaman di atas Rp.150.000,-.

Tabel 6. BMT Sampel Menurut Nilai Minimum Pinjaman

No	Nilai Pinjaman Minimum (Ribu)	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	< Rp. 50	20	27
2	> Rp. 50 – Rp.150	21	28
3	> Rp. 150	33	45
Total sampel		74	100

Selain menerapkan nilai minimum pinjaman, BMT juga menerapkan nilai maksimum pinjaman kepada nasabahnya. Tabel 7 memperlihatkan bahwa sebanyak 41% BMT sampel menerapkan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp. 300.000,- ke bawah; sebanyak 29% BMT sampel menerapkan nilai maksimum pinjaman sebesar Rp. 300.000,- s/d Rp.500.000,- dan 14% BMT menerapkannya di atas Rp. 500.000,- s/d Rp. 2juta dan sebanyak 16% menerapkan aturan itu lebih dari Rp. 2juta.

Tabel 7. BMT Sampel Menurut Nilai Maksimum Pinjaman

No	Nilai Maksimum Pinjaman	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	< Rp.300	28	41
2	> Rp.300 – Rp.500	20	29
3	> Rp.500 – Rp.2000	10	14
4	> Rp.2000 – Rp. 3000	11	16
Jumlah		69	100

4). Kebutuhan Tambahan Modal

Pada umumnya tambahan bantuan modal digunakan untuk memperbesar usaha di sektor riil. Pada Tabel 8 terlihat besarnya kebutuhan bantuan dari sejumlah sampel yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 31% BMT membutuhkan tambahan modal sebesar kurang dari Rp.10juta sebanyak 19% BMT membutuhkan tambahan modal sebesar Rp.10juta s/d Rp. 25juta sebanyak 22% BMT membutuhkan tambahan modal Rp.25juta s/d Rp. 50juta dan sebanyak 28% BMT membutuhkan tambahan modal sebesar lebih dari Rp. 50juta.

Tabel 8. BMT Sampel Menurut Besarnya Kebutuhan Tambahan Modal / BMT

No	Nilai Tambahan Modal Yang Dibutuhkan	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	< Rp.10	23	31
2	> Rp.10 s/d Rp.25	14	19
3	> Rp.25 s/d Rp.50	16	22
4	> Rp.50	21	28
Total sampel		74	100

5). Mobilisasi Tabungan

Agar masyarakat terdorong dan gemar menabung, sebaiknya diberikan insentif dalam bentuk bagi hasil yang disampaikan melalui kegiatan promosi, leaflet dan penyuluhan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pengurus majelis taklim. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada para penabung bervariasi antar BMT. Tabungan yang jangka waktunya lebih panjang mendapatkan nisbah bagi hasil lebih besar dibanding yang jangka waktunya lebih pendek. Nilai total tabungan per BMT dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. BMT Sampel Menurut Nilai Tabungan / BMT

No	Nilai Tabungan (juta)	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	< 5	28	41
2	> 5 s/d 10	20	29
3	> 10 s/d 25	10	14
4	> 25	11	16
Total sampel		69	100

Data tersebut menunjukkan bahwa nilai tabungan masyarakat di BMT sebagian besar di bawah Rp. 50juta. Dibandingkan dengan jumlah nasabahnya maka dipastikan tabungan BMT umumnya berasal dari penabung kecil. Tabel 10 berikut menggambarkan jumlah penabung per BMT. Hampir 30% BMT sampel mempunyai penabung lebih dari 250 orang dan sisanya (70%) mempunyai penabung antara 30 orang s/d 250 orang.

Tabel 10. BMT Sampel Menurut Jumlah Penabung / BMT

No	Jumlah Penabung (orang)	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	< 30	10	14
2	> 30 – 100	15	21
3	> 100 – 200	16	21
4	> 200 – 250	10	14
5	> 250	22	30
Total sampel		73	100

6). Kemampuan Menghasilkan Laba

BMT sebagai lembaga keuangan alternatif dapat menghasilkan profit yang cukup besar. Tabel 11 menunjukkan bahwa sebagian besar BMT yang diamati menghasilkan profit sebesar kurang dari Rp. 500.000,- sebanyak 16%; profit sebesar antara Rp.500.000,- s/d Rp.1juta sebanyak 28%; profit sebesar antara Rp.1 juta s/d Rp5 juta sebanyak 23%; profit sebesar antara Rp. 5juta s/d Rp. 10juta sebanyak 23% dan profit sebesar lebih besar dari Rp. 10juta sebanyak 5%.

Tabel 11. BMT Sampel Menurut Kemampuan Menghasilkan Laba/Tahun.

No	Nilai Rugi / Laba	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	Rugi	3	5
2	Laba < Rp. 500	10	16
3	Laba Rp. 500 – Rp.1000	17	28
4	Laba Rp. 1000 – Rp.5000	14	23
5	Laba Rp. 5000 – Rp.10.000	14	23
6	Laba Rp 10.000	3	5
Total sampel		61	100

7). Sarana Usaha

Data lapang menunjukkan bahwa sebagian besar BMT sampel tidak memiliki tempat usaha berupa tanah dan bangunan. Dalam menjalankan usahanya, BMT umumnya masih mengontrak tempat, menumpang atau karena mendapat hibah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 12,13,14 berikut. Tabel 12 menunjukkan, hanya 11% BMT yang memiliki tanah sendiri, 56% mengontrak/menyewa, 16% menumpang dan 17% mendapat hibah.

Tabel 12. BMT Sampel Menurut Status Kepemilikan Tanah

No	Status Tanah	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	Milik sendiri	8	11
2	Kontrak / sewa	42	56
3	Hibah	13	17
4	Numpang	12	16
Total sampel		74	100

Tabel 13 memperlihatkan, hanya 9% BMT yang memiliki bangunan sendiri, 54% mengontrak/menyewa, 17% menumpang dan 19% karena dapat hibah.

Tabel 13. BMT Sampel Menurut Status Kepemilikan Bangunan

No	Status Bangunan	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	Milik sendiri	7	9
2	Kontrak / sewa	40	54
3	Hibah	14	19
4	Numpang	13	17
Total sampel		74	100

BMT yang memiliki sarana transportasi sepeda sebesar 16%, memiliki sepeda motor sebanyak 47%, memiliki mobil hanya 5% dan tidak memiliki sarana transportasi sebanyak 32%. Data ini dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. BMT Sampel Menurut Kepemilikan Sarana Transportasi

No	Jenis Sarana Transportasi	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	Sepeda	12	16
2	Sepeda motor	35	47
3	Mobil	4	5
4	Tak ada	23	32
Total sampel		74	100

2. KESEHATAN KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN

Salah satu cara untuk melihat keberhasilan lembaga keuangan alternatif adalah dengan melihat kinerja kesehatan kelembagaan dan keuangan. Sebagai pedoman penilaian digunakan metoda yang dipakai PINBUK dalam menilai BMT. Fokus yang dinilai adalah aspek jasadiyah (yang terlihat), sedangkan aspek ruhiyah (yang tak tampak dari permukaan) tidak dinilai.

1). Kesehatan Kelembagaan

Proses penilaian kelembagaan BMT dimulai dengan mengelompokkan beberapa faktor atau komponen dasar yang diperkirakan sangat dominan mempengaruhi kinerja kelembagaan BMT. Penilaian kesehatan kelembagaan BMT dapat diwakili faktor-faktor berikut: (1). Peran serta masyarakat dalam pendirian BMT, (2). Tingkat kemandirian, (3). Keaktifan pengurus BMT, dan (4). Kualitas pengelola.

(1). Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian BMT

Proses pendirian BMT sangat memperhatikan tidak saja aspek ekonomi tetapi yang lebih penting adalah memperjuangkan nilai-nilai syariah yang diyakini para pendirinya dapat menolong kaum dhuafa terutama yang lemah ekonomi. Faktor kesediaan para pendiri memberikan modal awal sangat menentukan masa depan keberadaan BMT. Peranan tokoh masyarakat sangat dominan dalam pendirian BMT. Peranan para tokoh ini dapat dilihat dari jumlah orang yang mendirikan BMT. Semakin banyak pendiri BMT, diasumsikan semakin sehat BMT yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin sedikit pendiri BMT, diasumsikan semakin tidak sehat BMT tersebut. Pendiri dianggap banyak bila pendirinya lebih dari 20 orang dan dianggap sedikit jika pendirinya kurang dari 20 orang. Tabel 15 menunjukkan jumlah BMT yang mendapat dukungan dari tokoh masyarakat. Terlihat bahwa sebanyak 38% BMT hanya didukung oleh kurang dari 20 orang pendiri. dan sebanyak 62% BMT sampel didirikan oleh lebih 20 orang pendiri

Tabel 15. BMT Sampel Menurut Jumlah Para Pendiri

No	Jumlah Pendiri	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	< 20 orang	26	38
2	≥ 20 orang	43	62
Total sampel		69	100

(2). Tingkat Kemandirian

Hasil pengamatan lapang menunjukkan, semua BMT yang diteliti dibentuk atas swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, alim ulama, pengurus majelis taklim. Para pendiri ini menyediakan modal seadanya, yakni berkisar antara kurang dari Rp.2juta s/d lebih Rp.10juta (lihat Tabel 16).

Tabel 16. BMT Sampel Menurut Modal Awal Pendirian

No	Modal Awal Pendirian	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	< Rp. 2 jt	17	27
2	> Rp. 2 jt - 3 jt	14	22
3	> Rp. 3 jt - 5 jt	13	21
4	> Rp. 5 jt - 10 jt	10	16
5	> 10 jt	9	14
Total sampel		63	100

Cara membayar modal awal dilakukan dengan cara mencicil dan tunai. Hanya 28% yang membayar modal awal dengan tunai dan 72% membayarnya dengan cara mencicil (lihat Tabel 17).

Tabel 17. BMT Sampel Menurut Cara Membayar Modal Awal

No	Cara Membayar Modal Awal	Distribusi Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	Dibayar tunai	21	28
2	Dicicil < 5 x	17	23
3	Dicicil \geq 5 x	36	49
Total sampel		74	100

Kedua tabel memberi gambaran bahwa keberhasilan mengelola usaha tidak selalu ditentukan modal besar, malah dengan modal relative kecilpun bisa sukses. Beberapa BMT yang diteliti ternyata hanya memiliki modal awal pendirian di bawah Rp. 20 juta. Selain murah, meriah dan merakyat untuk pendirian BMT, para pendiri juga diperkenankan untuk melakukan ciclan penysetoran modal awal.

(3). Keaktifan Pengurus BMT

Secara ideal untuk menilai keaktifan pengurus harus dilakukan pengamatan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Namun, karena hal ini tidak bisa dilakukan karena keterbatasan waktu dan sumberdaya lainnya maka peneliti menggunakan variabel kehadiran sebagai pendekatan untuk menjelaskan keaktifan pengurus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran pengurus yakni ketua, sekretaris dan bendahara relative baik yang dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Frekuensi Kehadiran Pengurus BMT Sampel dalam 1 Bulan

No	Frekwensi Kehadiran Pengurus	Sebaran Pengurus BMT					
		Ketua		Sekretaris		Bendahara	
		Jlm BMT	%	Jlm BMT	%	Jlm BMT	%
1	Jarang	6	9	9	14	8	12
2	2 kali dlm seminggu	22	35	17	27	18	29
3	1 kali dlm seminggu	18	29	19	30	20	32
4	> 1 kali dlm seminggu	17	27	18	29	17	27
Total		63	100	63	100	63	100

Cara lain untuk mengukur keaktifan pengurus adalah menggunakan tolok ukur persentase kehadiran seluruh pengurus dalam rapat yang diselenggarakan BMT secara berkala. Jadi pengurus yang aktif adalah pengurus yang persentase kehadirannya dalam rapat tinggi. Diasumsikan, semakin tinggi tingkat kehadiran pengurus dalam rapat maka makin banyak tenaga dan perhatian dicurahkan untuk pengembangan BMT. Data ini dapat dilihat pada Tabel 19 berikut ini.

Tabel 19. BMT Sampel Menurut Kehadiran Pengurus dalam Rapat

No	Tingkat Kehadiran Pengurus	Sebaran BMT					
		Ketua		Sekretaris		Bendahara	
		Jlm BMT	%	Jlm BMT	%	Jlm BMT	%
1	< 25 %	1	2	4	6	-	-
2	25% - 50 %	6	10	2	3	6	10
3	51 % - 75 %	16	25	13	21	12	19
4	> 75 %	40	63	44	70	45	71
Total		63	100	63	100	63	100

(4). Kualitas Pengelola

Pengelola BMT terdiri dari manajer, bagian keuangan, bagian pembiayaan dan penagihan, serta sekretariat. Masing-masing pengelola mempunyai tanggung jawab dan wewenang. Pengelola yang bermutu dapat mempengaruhi kinerja kelembagaan BMT. Pengertian mutu pengelola umumnya dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan standar kompetensi untuk menjalankan BMT. Pengelola yang berpendidikan lebih tinggi diasumsikan lebih bermutu dibandingkan dengan yang berpendidikan lebih rendah. Standar kompetensi pengelola BMT diartikan sebagai kemampuan pengelola menjalankan standar operasi BMT sesuai dengan prinsip Bank Syariah. Pengelola harus memiliki skill/ketrampilan dalam mengelola usaha. Ketrampilan dapat diperoleh melalui pelatihan dari PINBUK setempat. Gambaran mengenai tingkat pendidikan karyawan dan jumlah karyawan dapat dilihat pada Tabel 20 berikut.

Tabel 20. BMT Sampel Menurut Jumlah Karyawan Tetap dan Pendidikannya

No	Jumlah Karyawan	Jml BMT	%	No	Tingkat Pendidikan	Jml Karyawan	%
1	1 orang	5	8	1	SLTP	11	6
2	2 s/d 3 orang	34	54	2	SLTA	97	52
3	4 s/d 5 orang	17	27	3	D.III – S.1	76	41
4	> 5 orang	7	11	4	S 2	2	1
Total		63	100			186	100

Karyawan yang dipekerjakan BMT berkisar antara 1 orang s/d lebih 5 orang. Perbedaan ini terjadi karena skala usaha BMT bervariasi. Tabel 21 memberi gambaran yang jelas atas mutu standar kompetensi pengelola BMT yaitu karyawan sebanyak 9% BMT belum pernah mendapat pelatihan sedangkan karyawan dari 91 % BMT sampel sudah pernah mendapat pelatihan.

Tabel 21. BMT Sampel Menurut Keikutsertaan Pengelola Dalam Pelatihan

No	Jumlah Peserta Ikut/Belum Ikut pelatihan	Sebaran BMT	
		Jumlah BMT	%
1	Belum pernah dilatih	6	9
2	1-2 orang pernah dilatih	30	43
3	3-4 orang pernah dilatih	30	43
4	> 4 orang pernah dilatih	4	5
Total BMT		70	100

Gambaran upah yang diterima karyawan pada masing-masing BMT dapat dilihat pada Tabel 22. Upah karyawan berkisar antara kurang dari Rp. 50.000,- s/d Rp. 300.000,- lebih per bulan. Data ini memperlihatkan bahwa standar gaji karyawan kelihatannya masih relatif rendah. Rendahnya upah sangat terkait dengan skala usaha BMT yang umumnya masih relatif kecil.

Tabel 22. BMT Sampel Menurut Upah Karyawan Tetap /Bulan

No	Penghasilan Per Bulan (Rp 000)	Jumlah BMT	%
1	< Rp. 50	8	11
2	> Rp. 50 s/d Rp.100	38	51
3	> Rp. 100 s/d Rp.200	17	23
4	> Rp. 200 s/d Rp.300	7	10
5	> Rp. 300	4	5
Total		74	100

2). Kesehatan Keuangan

Analisis kesehatan keuangan BMT akan dapat mengungkap sejauhmana pengelolaan usaha BMT dikelola, yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait: seperti para pendiri, pemilik/anggota, nasabah/peminjam, para Pembina BMT. Banyak cara yang dipakai untuk menilai kesehatan keuangan BMT seperti : (1). Struktur permodalan, (2). Kualitas aktiva produktif, (3). Likuiditas, (4). Rentabilitas, dan (4). Efisiensi.

(1). Struktur Permodalan

Keberadaan/kesehatan lembaga keuangan sangat tergantung dari kepercayaan nasabah/masyarakat, karena itu kepercayaan adalah segala-galanya bagi lembaga keuangan. Cara yang paling mudah untuk mengetahui dan menghitung kesehatan struktur permodalan BMT yaitu menghitung rasio antara Modal dan Simpanan yang dirumuskan sebagai berikut:

Rumus 1 : Struktur Permodalan

<p>Struktur modal = Modal : Simpanan Bila : < 5 %, adalah sangat tidak sehat 6 % - 15 % adalah kurang sehat 16 % - 25 % adalah sehat > 25 % adalah sangat sehat</p>
--

Modal adalah seluruh nilai simpanan pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib, penyertaan, hibah, cadangan, laba/rugi.

Simpanan adalah seluruh nilai simpanan sukarela, (misalnya simpanan mudhroabah, Idul Fitri, pendidikan dsb termasuk untung kepada pihak ketiga)

Mengenai kesehatan struktur permodalan BMT dapat dilihat pada Tabel 23. Faktor yang menentukan tingkat kesehatan struktur permodalan BMT antara lain partisipasi pendiri dalam memberikan modal, penciptaan laba, pemupukan dana cadangan, yang semuanya akan menambah kemampuan penyediaan modal sendiri.

Tabel 23. BMT Sampel Menurut Kesehatan Struktur Permodalan

No	Kesehatan Struktur Permodalan	Sebaran BMT	
		Jumlah BMT	%
1	Sangat tidak sehat	3	5
2	Kurang sehat	8	13
3	Sehat	5	8
4	Sangat sehat	47	74
Jumlah		63	100

(2). Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Kredit yang dikeluarkan harus disalurkan pada orang/nasabah yang tepat. Tepat berarti tepat jumlah dan waktu, tepat orang, tepat penggunaan, dan tepat pengembaliannya sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kualitas aktiva produktif diartikan sebagai sejumlah pembiayaan yang dapat menghasilkan pendapatan/bagi hasil dengan sedikit mungkin menimbulkan kredit macet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan jaminan hanya diberikan kepada peminjam skala besar. Jaminan itu berupa sertifikat tanah, BPKB, barang atau akte/surat-surat berharga lain.

Rumus 2 : Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

<p>Kredit jatuh tempo (bermasalah)</p> <p>KAP = -----</p> <p style="text-align: center;">Total pembiayaan</p> <p>Bila : > 10 %, adalah sangat tidak sehat</p> <p style="padding-left: 20px;">6 % - 10 % adalah kurang sehat</p> <p style="padding-left: 20px;">3 % - 5 % adalah sehat</p> <p style="padding-left: 20px;">> 3 % adalah sangat sehat</p>

Penentuan kinerja BMT dalam pencapaian kualitas aktiva produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 24. BMT Sampel Menurut Kesehatan Kualitas Aktiva Produktif

No	Kualitas Aktiva Produktif	Sebaran BMT	
		Jumlah BMT	%
1	Sangat tidak sehat	4	7
2	Kurang sehat	1	2
3	Sehat	5	8
4	Sangat sehat	16	27
5	Tidak ada kredit macet	33	56
Jumlah		59	100

(3). Likuiditas

Tersedianya secara cukup dana kas dan bank (aktiva yang paling likuid) yang dapat diuangkan sewaktu-waktu menjadi jaminan kesehatan likuiditas bagi BMT yang bersangkutan. Tersedianya dana likuid juga memberikan rasa aman bagi penabung/nasabah. BMT yang sehat dan likuid adalah BMT yang mampu menjaga tersedianya dana kas dan bank dalam jumlah yang sangat kecil atau sangat besar. Bila dana kas dan banknya terlalu kecil bisa disebut BMT yang *illikuid*, sementara yang terlalu besar dana likuiditasnya bisa dikategorikan sebagai BMT yang memegang dana yang *idle (menganggur)*. BMT yang illikuid akan menimbulkan penurunan kepercayaan dari masyarakat, sementara bagi BMT yang banyak idle memberi dampak pada *tingginya cost of fund*, karena selama uang itu menganggur, BMT harus membayar bagi hasil kepada si penyimpan. Adapun rumus untuk menentukan apakah BMT memenuhi kesehatan likuiditas adalah sebagai berikut.

Rumus 3 : Likuiditas

<p>Total pembiayaan</p> <p>Likuiditas = -----</p> <p>Total dana diterima</p> <p>Bila : > 94 % , adalah sangat tidak likuid > 90 % - 94 % adalah kurang likuid > 75 % - 90 % adalah likuid > 75 % adalah sangat likuid</p>

PINBUK menyarankan agar BMT dapaa mempertahankan dana lancar (likuid) yang dianggap aman berkisar 10% - 20%. Pengalaman di lapang menunjukkan, umumnya BMT menyediakan dana kas yang dianggap aman sebesar 25% -30%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 11% BMT yang sngat tidak likuid, 17% kurang likuid, 25% likuid tinggi dan 47% sangat tinggi likuiditasnya.

Tabel 25. BMT Sampel Menurut Likuiditas

No	Likuiditas	Sebaran BMT	
		Jumlah BMT	%
1	Sangat tidak likuid	6	11
2	Kurang likuid	9	17
3	Likuid tinggi	13	25
4	Sangat tinggi likuid	25	47
Jumlah		53	100

(4). Rentabilitas

Rentabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan BMT dalam menghasilkan laba/surplus sesuai dengan nilai asset yang dimiliki. Laba adalah sesuatu yang sangat didambakan dunia usaha termasuk BMT. Rumus untuk menentukan kesehatan rentabilitas adalah sebagai berikut.

Rumus 4 : Rentabilitas

Laba (surplus)
Rentabilitas = -----
Total harta
Bila : > 1 %, rentabilitasnya sangat rendah
> 1 % - 1,9 % rentabilitasnya kurang
> 2 % - 3 % rentabilitasnya tinggi
> 3 % rentabilitasnya sangat tinggi

Dari sejumlah BMT sampel yang diteliti, 14% BMT sangat rendah rentabilitasnya, 73% sangat tinggi, 10% tinggi dan 3% kurang. Data ini dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. BMT Sampel Menurut Rentabilitas

No	Rentabilitas	Sebaran BMT	
		Jumlah BMT	%
1	Sangat rendah	8	14
2	Kurang	2	3
3	Tinggi	6	10
4	Sangat tinggi	43	73
Jumlah		59	100

(5). Efisiensi

Efisiensi dapat diartikan sebagai kemampuan BMT mengendalikan biaya operasional untuk menghasilkan pendapatan operasional tertentu. Biaya operasional meliputi biaya bagi hasil simpanan, overhead cost seperti listrik, karyawan, telepon, biaya penagihan dll. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bagi hasil, mark up dan hasil kegiatan pendanaan suatu usaha nasabah. Efisiensi usaha BMT dapat diukur dengan menghitung rasio antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Jika rasionya >1 berarti BMT mengalami kerugian dan bila <1 berarti BMT mendapat keuntungan.

Rumus 5 : Efisiensi

Biaya operasional
Efisiensi = -----
Pendapatan operasional
Bila : > 90 %, efisiensinya sangat rendah
> 76 % - 90 % kurang efisien
> 60 % - 75 % efisiensinya tinggi
> 60 % efisiensinya sangat tinggi

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar BMT masih kurang efisien dalam mengelola usahanya. BMT sampel mengalami

kerugian karena terbebani biaya lain yang cukup besar yaitu social cost (biaya perkumpulan) yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan BMT secara langsung. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27. BMT Sampel Menurut Efisiensi

No	Efisiensi	Sebaran BMT	
		Jumlah BMT	%
1	Rugi	3	4
2	Sangat rendah	13	20
3	Kurang	21	31
4	Tinggi	10	15
5	Sangat tinggi	20	30
Jumlah		67	100

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- 1). Dilihat dari prosedur pembiayaan dan jangkauan pelayanannya, BMT merupakan lembaga keuangan alternatif yang sangat efektif dalam melayani kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka pendek yang sangat diperlukan pengusaha kecil mikro. Dalam menjalankan usahanya, baik BMT yang berbentuk KSM maupun berbentuk koperasi menggunakan prinsip-prinsip koperasi yang orientasi pelayanannya selalu berpegang pada prinsip sederhana, murah dan cepat.
- 2). Perkembangan asset BMT yang sangat cepat ditentukan adanya mobilisasi dana dari pihak ketiga serta cepatnya perputaran pengembalian pinjaman para nasabah yang selanjutnya dipinjamkan kepada nasabah lain.
- 3). Lembaga keuangan ini dapat menghasilkan profit yang cukup besar dan sangat menguntungkan para pemiliknya.
- 4). Pada umumnya BMT yang diteliti menggunakan pola pembiayaan mudharabah dan Bai Bitsaman Aji (BBA). Pola pembiayaan BBA punya keunggulan karena punya tingkat perputaran yang sangat tinggi, berisiko rendah dan memberikan margin keuntungan yang relatif besar.
- 5). Dasar pemberian pinjaman kepada nasabah adalah berupa penilaian kelayakan usaha, biaya administrasi sebesar 1% dan 2%. Pinjaman di bawah Rp.300.000,- tidak menggunakan jaminan. Yang menjadi jaminannya adalah kepercayaan yang diberikan pemuka masyarakat adat/agama atau pemerintah yang mengetahui secara mendalam jati diri si peminjam.
- 6). Jasa pinjaman/pembiayaan yang diberikan kepada nasabah/anggota selalu dimusyarahkan dan disepakati terlebih dahulu dan bersifat fleksibel. Jika debitur tidak mampu membayar pinjamannya karena alasan yang wajar, maka kesepakatan bisa ditinjau kembali. Jika samasekali tidak bisa mengembalikan karena pailit maka pinjaman diputihkan.
- 7). Untuk mendorong orang menabung, BMT menggunakan pola nisbah bagi hasil, misalnya 65 :35 (BMT : Penabung)

- 8). Analisis penilaian terhadap kesehatan kelembagaan BMT yang meliputi aspek pendirinya, keaktifan pengurus maupun kualitas pengelola dapat dinyatakan bahwa BMT yang diteliti dinyatakan sangat sehat.
- 9). Kesehatan keuangan BMT dinilai dari lima aspek yaitu struktur permodalan, kualitas aktiva produktif, likuiditas, efisiensi, dan rentabilitas. Dilihat dari kelima aspek tersebut maka BMT sampel yang diamati ada yang amat sehat, sehat, kurang sehat dan sangat tidak sehat.

2. Saran

- 1). Pembiakan BMT perlu dipercepat agar jumlah BMT semakin banyak ditengah-tengah masyarakat.
- 2). Perlu dilakukan kembali penilaian terhadap kebijakan penyediaan bantuan keuangan revolving fund dengan mengintroduksi dana padanan dari pemilik/pendiri.
- 3). Perlu dilakukan pengembangan sistem interlending antar BMT.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, (1995). *Pedoman Cara Pembentukan BMT*. Pinbuk, Jakarta.

Anonim, (1995). *Peraturan Dasar dan Contoh AD/ART BMT*. PINBUK, Jakarta.

Anonim, (1995). *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*. PINBUK, Jakarta.

Lestiadi, Suhadji, (1998). *Peranan Bank Muamalat Dalam Mengembangkan Lembaga Keuangan Alternatif*. Jakarta.

Masngudi, (1998). *Koperasi Pembiayaan Indonesia*. Jakarta.

Usman, Marzuki (1998). *Strategi Pengembangan Pembiayaan Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi Menghadapi Perdagangan Bebas*.

Kewirausahaan Muslim, (1996). " *Mitra Usaha Kecil*" *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Majalah PINBUK.